

332.7
AH1
a e 1

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KREDIT MACET PADA BPR BKK DAWE, KUDUS

TESIS

*Diajukan kepada Pengelola Program Studi Magister Manajemen
Universitas Diponegoro
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana - S2 Magister Manajemen*



Diajukan Oleh :

N a m a : **AHIMSA**
N I M : C4A099010

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2000**



Sertifikat

Saya, Ahimsa, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program magister manajemen ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

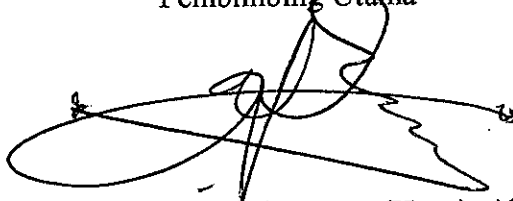
Ahimsa
19 Desember 2000.

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul :
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
KREDIT MACET PADA BPR BKK DAWE, KUDUS**

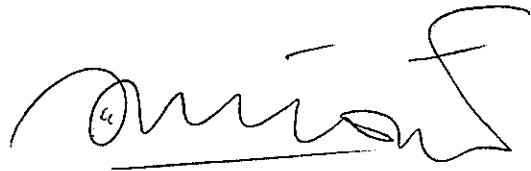
Yang disusun oleh Ahimsa NIM. C4A099010
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal 19 Desember 2000
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama



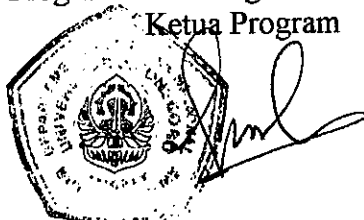
(Drs. Arifin Sabeni, Mcom (Hons), Akt.)

Pembimbing Anggota



(Dra. Amie Kusumawardhani, MSc.)

Semarang, 19 Desember 2000
Universitas Diponegoro
Program Pascasarjana
Program Studi Magister Manajemen
Ketua Program



Prof. Dr. Suyudi Mangunwihardjo

MOTTO

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni Syurga, mereka kekal di dalamnya.

QS. Huud : 23

Kupersembahkan untuk :

- Papa dan Ibu yang mulia, A. ST. SAIDI dan SYT'ARNI
- Bapak dan Mama yang mulia, SYAROPI dan RASMI
- Istriku tercinta, Drg. RITA MAILINA
- Anak-anakku tersayang, SALLY SALSABILLA dan
RAISSA ARDELIA

ABSTRACT

BPR, as a banking Institution, collects funds from public and distributes it backs to public in form of credits. Credits are a highly risky business because there are chances that it cannot be collected, when it has been given, because of many reasons. Therefore, before releasing a credit, doing credit analysis to prevent credit stagnation is important.

Credit stagnation, which happens in banking business, are also happening in BPR BKK Dawe, KUDUS, as can be seen in growing credit stagnation that likely to increase and even in June and July 2000 it amounts to more than 34%. Therefore, this research is undertaken to exam empirical evidence about factors that significantly causal for credit stagnation. This research is hoped to find out how far it affects on credit stagnation and also to suggest alternative solutions to deal with this condition.

Using Simple random sampling utilizing by Harry King's Nomogram, it results in 35 debtors as samples. In this examination, credit stagnation proxy as the amount of credit given by debtor as Y, while credit terms (X_1), interest rate (X_2), and the level of collectibility (X_3) are given different measure as month, Rupiah, and %, respectively. It is then transformed into log natural model (ln).

Subsequently, the model was analyzed using coupled linear regression. Utilizing SPSS 10.00 version, the result of analysis show that all factors these are credit terms (X_1), interest rate (X_2), and the level of collectibility (X_3), both partial and collective have significant influence ($\alpha = 0,05$) on credit stagnation.

ABSTRAKSI

BPR sebagai lembaga perbankan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit merupakan kegiatan bisnis yang beresiko tinggi karena adanya kemungkinan kredit yang diberikan tak tertagih dengan berbagai macam alasan. Untuk itu sebelum kredit diberikan perlu dilakukan analisis kredit agar tidak menjadi kredit macet dan bermasalah.

Kredit macet yang terjadi pada dunia perbankan juga terjadi pada BPR BKK Dawe, Kudus. Hal ini terlihat pada perkembangan kredit macet yang mempunyai kecenderungan meningkat, bahkan pada bulan Juni dan Juli 2000 kredit macetnya melebihi 34 %. Untuk itu dirasa perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor apa saja yang secara signifikan menyebabkan terjadinya kredit macet dan sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet dan mencari alternatif solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kredit macet tersebut.

Dengan metode *simple random sampling* yang mempergunakan tabel nomogram Harry King diperoleh 35 debitur sebagai sampel. Dalam penelitian ini kredit macet diprosisikan menjadi jumlah kredit macet dari debitur dan diberi kode Y sedangkan jangka waktu kredit (X_1), tingkat bunga (X_2) dan angka kolektibilitas (X_3) dengan satuan yang berbeda masing-masing bulan, rupiah, dan prosentase dan dirubah dalam bentuk model log natural (\ln).

Setelah itu model tersebut dianalisis dengan regresi logaritma natural. Dengan bantuan program SPSS versi 10.00. Hasilnya independent variable yang berupa : jangka waktu kredit ($\ln X_1$), tingkat bunga kredit ($\ln X_2$) dan kolektibilitas kredit ($\ln X_3$) secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah kredit macet dengan $\alpha = 5\%$).

UPT-PUSTAKA-PADIN

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang teramat dalam, penulis pujikan kepadaNya yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyusun tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat sarjana S2 Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan yang berguna dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Sujudi Mangunwihardjo selaku ketua program studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang beserta staf pengajarannya, yang telah memberi bimbingan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak DR. Augusty Tae Ferdinand, MBA selaku Deputy I yang selalu mendorong dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Drs. Arifin Sabeni, Mcom (Hons), Akt sebagai dosen pembimbing utama dan Ibu Dra. Amie Kusumawardhani, MSc sebagai dosen pembimbing anggota yang telah membimbing, mengarahkan serta memberi dorongan yang besar sehingga terselesaikannya tesis ini.
4. Pimpinan dan staf BPR BKK Dawe, Kudus yang telah memberi kesempatan serta pelayanan yang baik kepada penulis dalam memberikan data-data penelitian.
5. Teman-teman penulis atas dukungan dan kebersamaannya selama pendidikan.

Harapan penulis, walaupun tesis ini telah terwujud namun penulis menyadari bahwa tesis masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati atas segala bantuan, saran, kritik yang sifatnya memberikan perbaikan untuk tesis ini.

Penulis

Ahimsa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SERTIFIKAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Kegunaan	6
1.3.3 Sistematika Penulisan	6

BAB II : TELAAH PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka	8
--------------------------	---

2.1.1	Pengertian dan Fungsi Bank.....	8
2.1.2	Jenis Bank.....	9
2.1.3	Bank Perkreditan Rakyat.....	10
2.1.4	Perkreditan.....	18
a.	Pengertian Kredit	18
b.	Fungsi Kredit	18
c.	Analisa Kredit	19
d.	Upaya Penyelamatan Kredit Macet.....	26
e.	Upaya Penyelesaian Kredit Macet	27
2.2	Penelitian Terdahulu.....	30
2.3.	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	32
2.3.1.	Hipotesis	33
2.3.2.	Definisi Operasional	34

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan Sumber Data	36
3.1.1	Data Primer.....	36
3.1.2	Data Sekunder	36
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	36
3.2.1	Metode Wawancara	36
3.2.2	Metode Observasi	37
3.2.3	Penelitian Kepustakaan	37
a.	Studi Pustaka	37

b. Dokumentasi	37
3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	37
3.4 Metode Analisis Data	38
3.4.1 Analisis Rasio Kolektibilitas	38
3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda dengan Logaritma Natural.....	38
3.4.3 Analisis Kualitatif.....	40
 BAB IV : GAMBARAN UMUM BPR BKK DAWE, KUDUS	
4.1 Sejarah BPR BKK Dawe, Kudus.....	41
4.2 Struktur Organisasi Beserta Tugas dan Wewenang	43
4.2.1 Struktur Organisasi BPR BKK Dawe, Kudus	43
4.2.2 Tugas dan Wewenang	45
4.3 Pengurus	47
4.3.1 Badan Pengawas	47
4.3.2 Pimpinan dan Kepala Seksi	48
4.4 Pemilik.....	48
4.5 Keuangan	49
4.6 Produk yang Ditawarkan	51
4.6.1 Tabungan.....	51
4.6.2. Kredit	52
 BAB V : ANALISIS DATA	
5.1 Informasi Data	53
5.2 Hasil Persamaan Regresi yang Diperoleh	54

5.2.1	Evaluasi Ekonomi (Apriori)	55
5.2.2	Evaluasi Ekonometrik	55
5.2.3	Evaluasi Statistik	58
5.3	Pengaruh Beberapa Variabel Bebas (X_1 , X_2 dan X_3) Terhadap Kredit Macet (Y)	61
5.3.1	Jangka Waktu Kredit (ln X_1)	61
5.3.2	Tingkat Bunga Kredit (ln X_2)	62
5.3.3	Kolektibilitas Kredit (ln X_3)	62
5.4	Analisis Kualitatif	63
5.4.1	Upaya Penyelamatan	64
	a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)	65
	b. Penataan Kembali Persyaratan Kredit (Reconditioning)	66
	c. Reorganisasi dan Rekapitalisasi (Reorganization and Recapitalization)	67
	d. Bekerjasama dengan Aparat Pemerintah Setempat	68
5.4.2	Upaya Penyelesaian	68
	a. Menagih Langsung Kepada Debitur	69
	b. Menguasai Barang Agunan	69
	c. Menggunakan Jasa Penagih Swasta yang Independent	70
	d. Penyelesaian Menurut Hukum	70

BAB VI : IMPLIKASI KEBIJAKAN

6.1 Tingkat Bunga Kredit	72
6.2. Jangka Waktu Kredit.....	73
6.3 Kolektibilitas Kredit	74

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan.....	75
7.2 Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Tabel Perkembangan Kredit Macet BPR BKK Dawe, Kudus	4
Tabel 4.1	: Sumber Daya Manusia BPR BKK Dawe, Kudus.....	43
Tabel 4.2	: Susunan Badan Pengawas BPR BKK Dawe, Kudus.....	48
Tabel 4.3	: Susunan Pimpinan dan Kepala Seksi BPR BKK Dawe, Kudus	48
Tabel 4.4	: Komposisi Kepemilikan BPR BKK Dawe, Kudus.....	49
Tabel 4.5	: Jumlah Kredit dan Perolehan Laba BPR BKK Dawe Kudus 10 tahun Terakhir.....	49
Tabel 4.6	: Jumlah Modal Disetor, Dana Pihak Ketiga BPR BKK Dawe, Kudus	51
Tabel 5.1	: Hasil Uji-t.....	56
Tabel 5.2	: Coeficient Correlations	56
Tabel 5.3	: Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	58
Tabel 5.4	: Hasil Uji Regresi.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPR BKK Dawe, Kudus	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A : Data Mentah Variabel-variabel Penelitian
- Lampiran B : Hasil Logaritma Natural Data Variabel
- Lampiran C : Output Regresi Untuk Kredit Macet Di BPR BKK Dawe,
Kudus
- Lampiran D : Penghitungan Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran E : Penghitungan Beta Coofisient

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia memobilisasi pelaku bisnis di Indonesia untuk mencari alternatif pengadaan permodalan dan investasi. Seperti telah diketahui, permodalan dapat dipenuhi melalui penambahan modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, modal pinjaman, cadangan tujuan dan cadangan umum, sedangkan modal asing dapat berasal dari pinjaman atau kredit maupun menarik investor baru ke dalam bisnis organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk pengupayaan mobilisasi investasi tersebut perlu ditunjang oleh lembaga yang berkompeten, seperti bank dan lembaga non bank, perusahaan leasing serta didukung oleh sarana operasional seperti pasar modal dan pasar uang yang mampu beroperasi sesuai perkembangan pasar dan kegiatan perekonomian.

Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana lembaga perbankan lainnya, adalah menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pertumbuhan BPR di Indonesia sangatlah pesat. Sebagai gambaran kondisi BPR di Jawa Tengah, pada tahun 1984 ada 44 BPR dan pada tahun 1995 telah berkembang menjadi 401 BPR (Silvester Roeslan dan Soepadi,

UPT-PUSTAK-UNDIP

1996) dan pada posisi Februari 2000 telah berkembang menjadi 541 BPR (Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Feb.2000)

Dengan makin pesatnya pertumbuhan BPR, maka persaingan antar bank menjadi semakin ketat. Hal ini mendorong BPR tersebut menawarkan banyak hal yang dapat digunakan untuk menarik konsumen atau nasabah bergabung dengan bank mereka. Untuk menarik dana dari masyarakat salah satunya dengan menawarkan suku bunga yang menarik dan beberapa hadiah-hadiah, sedangkan untuk menyalurkan kreditnya biasanya ditawarkan mengenai kemudahan-kemudahan persyaratannya dan waktu proses yang cepat.

Dalam pengertian orang awam, kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati (Iswardono dan Sandro. 1993). Kredit merupakan kegiatan bisnis yang mengandung resiko tinggi, karena ada kemungkinan kredit yang diberikan tidak tertagih kembali dengan berbagai macam alasan. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit perlu adanya analisis kredit. Probit Hitching (1999) mengatakan bahwa *"The purpose of credit analysis is to forecast the ability of aborrower to meet its debt obligations as they arise"*.

Berdasarkan data per 31 Desember 1993 di Indonesia, kredit bermasalah telah mencapai 21,2 % dari outstanding Rp. 91,8 trilyun, termasuk kredit macet sebesar Rp. 19 Trilyun.

Dari jumlah tersebut yang sudah diproses oleh Badan Urusan dan Lelang Negara sudah mencapai Rp. 3,6 trilyun. Angka kredit macet yang cukup tinggi, merupakan macetnya suatu produk bank.

Jika macetnya produk bukan bank, maka hal ini akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan tersebut, yang dimiliki para pemegang saham. Sedangkan pada bank, masalahnya akan lain karena kredit macet tidak saja akan merugikan para pemilik/ pemegang saham bank tersebut, tetapi juga akan merugikan para pemilik dana, yang sebagian besar adalah anggota masyarakat dari berbagai lapisan dan tingkat kehidupan, yang dapat meresahkan masyarakat bahkan merusak sendi perekonomian suatu negara (Mahmoeddin, 1995).

Kredit macet yang terjadi pada dunia perbankan tersebut juga dialami oleh BPR BKK Dawe, Kudus yang juga merupakan salah satu pelaku dunia perbankan. Oleh karena itu BPR BKK Dawe, Kudus di dalam mengucurkan kreditnya juga harus melakukan analisis kredit. Hal ini perlu dilakukan, agar apabila nantinya bank meluluskan permintaan kredit, resiko kredit yang diberikan itu berkembang menjadi kredit bermasalah dapat diperkecil (Siswanto Sutojo, 1997).

BPR BKK Dawe, Kudus merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Namun dalam penyaluran kredit di BPR BKK Dawe, Kudus terdapat jumlah kredit macet yang cukup besar sebagaimana terlihat perkembangan kredit macet selama waktu 1 tahun pada tabel di bawah ini:

Tabel 1-1
Perkembangan Kredit Macet BPR BKK Dawe, Kudus

BULAN	TOTAL KREDIT (ribuan rupiah)	KREDIT MACET (ribuan rupiah)	PERSENTASE (%)
Agustus 1999	318.524	91.217	28,64
September	298.375	91.058	30,52
Oktober	287.620	92.970	32,32
November	297.691	94.511	31,75
Desember	299.888	94.180	31,41
Januari 2000	293.962	96.024	32,67
Februari	299.556	98.851	33,00
Maret	301.272	98.740	32,77
April	313.549	96.040	30,63
Mei	310.620	96.114	30,94
Juni	319.916	109.457	34,21
Juli	324.738	112.264	34,57

Sumber Data: Laporan bulanan BPR BKK Dawe, Kudus (posisi bulan Agustus 1999 s/d Juli 2000)

Dari tabel di atas terlihat kecenderungan terjadinya peningkatan jumlah kredit macet , bahkan pada bulan Juni dan Juli 2000 kredit macetnya melebihi 34%. Untuk itu dirasa perlu dilakukan penelitian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada BPR BKK Dawe, Kudus, serta bagaimana mengatasinya.

1.2 Perumusan Masalah

Kredit macet yang terjadi pada perbankan juga terjadi pada BPR BKK Dawe, Kudus dalam jumlah yang cukup besar sebagaimana terlihat perkembangan kredit macet selama 1 tahun pada tabel 1-1 di atas terutama untuk posisi bulan Juni dan Juli 2000 mencapai \pm 34%. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan pada penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

Ada kecenderungan meningkatnya kredit macet sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kredit macet.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Apakah jangka waktu kredit, tingkat suku bunga kredit dan kolektibilitas secara signifikan menyebabkan terjadinya kredit macet pada BPR BKK Dawe, Kudus.
2. Sejauhmana jangka waktu kredit, tingkat suku bunga kredit dan kolektibilitas berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet.
3. Untuk menganalisis alternatif solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kredit macet.

1.3.2 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh:

1. BPR BKK Dawe, Kudus, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan menentukan strategi mengenai kredit dan bagaimana mengatasi kredit macet.
2. Pihak lain, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.3.3. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisi: Latar Belakang, Perumusan Masalah serta Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : Telaah Pustaka

Berisi tentang Telaah Pustaka, Penelitian Terdahulu serta Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB III : Metode Penelitian

Berisi : Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, metode sampel dan Metode Analisis Data.

BAB IV : Gambaran Umum BPR BKK Dawe, Kudus

Berisi : Sejarah Perusahaan, Struktur Organisasi, Pengurus, pemilik, kondisi keuangan, produk yang ditawarkan.

BAB V : Analisis Data

BAB VI : Implikasi Kebijakan

BAB VII : Kesimpulan dan Saran

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Bank

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain (Thomas Suyatno, 1997). Sedangkan menurut Undang-undang No. 7/1992 dikatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selanjutnya dijelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia (pasal 3) adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Menurut Soediyono (1997), fungsi pokok perbankan dilihat dari kemanfaatannya, terhadap struktur ekonomi atau dunia usaha adalah sebagai berikut :

1. Fungsi pengumpulan dana, yang dimaksud disini adalah dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Ketiga sumber dana inilah yang merupakan sumber dana bank selain sumber dana modal sendiri.
2. Fungsi pemberian kredit, dana yang dikumpulkan oleh bank harus segera dijalankan atau diputar, sebab terhadap dana tersebut bank terkena biaya jasa giro, bunga deposito dan tabungan serta biaya operasional seperti gaji, sewa gedung dan penyusutan.

3. Fungsi penanaman dana atau investasi, yang dimaksud investasi disini adalah si penanam dana akan memperoleh imbalan yang berupa bunga laba atau deviden.
4. Fungsi penciptaan uang, fungsi penciptaan uang dipandang sebagai fungsi paling pertama bank umum dalam perekonomian, keberhasilan dalam mengelola fungsi pertama dan fungsi kedua berarti, bahwa fungsi penciptaan uang telah dilaksanakan dengan baik.
5. Fungsi pembayaran, fungsi pembayaran ini pelaksanaannya tidak hanya melalui cek dan bilyet giro saja, tetapi juga melalui surat wesel, transfer uang, baik melalui surat maupun telegram.
6. Fungsi pemindahan uang, yang biasa disebut sebagai pentransferan uang antara lain bisa dilakukan melalui telegram, surat atau menyerahkan wesel tunjuk.
7. Fungsi pemasok produk perbankan lain, yaitu jasa perbankan dalam negeri dan jasa perbankan luar negeri.

2.1.2 Jenis Bank

Dalam Undang-undang Perbankan tahun 1967, jenis bank dapat dibedakan dari segi fungsi dan segi pemiliknya. Dari segi fungsinya ada empat macam jenis bank, yaitu bank sentral, bank umum, bank tabungan dan bank pembangunan. Sedangkan dilihat dari pemilikannya terdapat tiga jenis bank, yaitu bank milik negara, bank koperasi dan bank swasta.

Namun dalam Undang-undang Perbankan tahun 1992 tampaknya pengaturan jenis bank hanya dilihat dari segi fungsinya saja. Hal mana diatur dalam pasal 5 ayat (1), yang terdiri dari :

1. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 butir 2).
2. Bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (pasal 1 butir 3).

Suatu jenis bank yang dapat diharapkan membantu pemerintah dalam upaya pelaksanaan pembangunan di Indonesia karena dapat menjangkau lapisan terendah dari masyarakat baik di kota maupun di daerah pedesaan telah ada di Indonesia sejak hampir satu abad, hingga sekarang masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dengan demikian jenis bank tersebut yang dikenal sebagai bank perkreditan rakyat belum banyak dikenal oleh masyarakat serta belum dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menunjang perkembangan perekonomian rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama di daerah pedesaan (Pandu Suharto, 1985).

2.1.3 Bank Perkreditan Rakyat

Salah satu jenis bank yang ada di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sesuai dengan undang-undang No. 7/1992 pasal 13 (Gatot Supramono, 1996), dikatakan bahwa usaha dari BPR meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan Kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Bank perkreditan rakyat dari segi kedudukan dan ruang lingkup operasinya di kecamatan, akan tetapi dalam perkembangannya BPR dapat juga didirikan di ibukota kabupaten dan propinsi dengan cara modal disetor untuk mendirikan BPR (sesuai pasal 4 Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- Rp.2000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang.
- Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah Ibukota propinsi di luar wilayah tersebut di atas.
- Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di luar wilayah-wilayah tersebut di atas.

a. Permodalan BPR

Pengertian modal bagi BPR (peraturan pemerintah No.71/1992) terdiri dari :

1. Modal Inti

Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa :

- Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.
- Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat

anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing BPR.

- Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%.

Dalam hal pada tahun berjalan Bank Perkreditan Rakyat mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

Modal inti tersebut pada poin-poin diatas harus dikurangi dengan :

- ♦ Goodwill, apabila ada dalam pembukuan Bank Perkreditan Rakyat.
- ♦ Kekurangan dana penyisihan penghapusan piutang ragu-ragu yang dihitung sesuai ketentuan Bank Indonesia. Ketentuan ini diberlakukan pada akhir bulan Desember 1996.

2. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa :

- Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang selama ini dikenal dengan cadangan aktiva yang diklarifikasikan, yaitu penyisihan penghapusan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produksi. Dalam kategori cadangan ini meliputi cadangan piutang ragu-ragu.

Jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR.

- Modal pinjaman (sebelum disebut modal kuasi) adalah hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri ;
 - Tidak dijamin Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
 - Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
 - Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian Bank Perkreditan Rakyat melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun Bank Perkreditan Rakyat belum dilikuidasi.
 - Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila Bank Perkreditan Rakyat dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Dalam pengertian modal pinjaman ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyetoran modal yang efektif oleh pemilik Bank Perkreditan Rakyat yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi.

- Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal) dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;
 - Ada perjanjian tertulis antara Bank Perkreditan Rakyat dengan pemberi pinjaman.
 - Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat Bank Perkreditan Rakyat mengajukan permohonan persetujuan, Bank Perkreditan Rakyat harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
 - Tidak dijamin oleh Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.
 - Minimal berjangka waktu lima tahun.
 - Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank Perkreditan Rakyat tetap sehat.
 - Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal adalah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (Prorata). Jumlah pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap adalah setinggi tingginya sebesar 50% dari modal inti. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 4 surat keputusan direksi Bank Indonesia, seluruh modal pelengkap tersebut hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti.

b. Lapangan Usaha BPR

Lapangan usaha Bank Perkreditan Rakyat (Thomas Suyatno, 1997) adalah sebagai berikut :

- Menerima tabungan atau simpanan, penabung dan peminjam harus diberi buku atau kartu tabungan.
- Menerima simpanan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu paling lama 3 bulan.
- Tidak diperkenankan ikut dalam lalu lintas giro, karena BPR merupakan bank yang tidak dapat menciptakan uang.
- Menerima dan memberikan kredit kepada pedagang di pasar atau penduduk desa.
- Tidak diperkenankan melakukan praktek giro.

2.1.4 Perkreditan

a. Pengertian Kredit

Pengertian kredit mempunyai banyak dimensi, dimulai dari arti kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Credere*" yang mempunyai arti kepercayaan. Sedangkan dalam bahasa Latin "*Creditur*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran (Iswardono dan Sandro, 1993). Sedangkan menurut Undang-undang No. 7 /1992 pasal 1 butir 12, pengertian kredit disebutkan sebagai berikut : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Gatot Supramono, 1996). Sedangkan menurut Teguh Pujo Mulyono (1993), kredit adalah kapasitas untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

b. Fungsi Kredit

Suatu usaha atau perusahaan hanya dapat terwujud bila ada sumber modal, dimana sumber modal tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar usaha tersebut. Sumber dana dari luar diantaranya dari pinjaman bank atau yang disebut dengan kredit. Sedangkan fungsi dari kredit itu sendiri (Hadiwijaya dan Rivai , 1991) adalah sebagai berikut :

1. Dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa.
2. Dapat mengaktifkan alat pembayaran.
3. Kredit dapat dijadikan sebagai alat pengendali harga.
4. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

c. Analisis Kredit

Kredit merupakan suatu usaha yang mengandung resiko tertentu. Untuk mengurangi atau meminimalkan tingkat resiko yang dapat terjadi dari pemberian kredit, perlu dilakukan suatu analisa kredit yang cermat. Siswanto Sutojo (1997) mengatakan bahwa kemampuan dan kesediaan debitur melunasi kredit sangat dipengaruhi oleh enam faktor intern dan ekstern yang disebut *the C's of credit*. Hal senada dikatakan oleh Iswardono dan Sandro (1993) yaitu untuk dapat memasarkan kredit dengan baik dan benar perlu diperhatikan adanya prinsip-prinsip perkreditan yang dikenal dengan nama 5 C atau 6 C yang antara lain:

1. *Character* - sifat atau moral si calon peminjam.
2. *Capacity* – kemampuan melunasi si calon peminjam.
3. *Capital* – modal dasar si calon peminjam.
4. *Collateral* – agunan atau jaminan yang disediakan.
5. *Condition of economy* – kondisi perekonomian.

Adapun C yang keenam banyak versinya (ada yang serius ataupun tidak) misalnya :

- *Constraint* – kendala yang tidak memungkinkan usaha tersebut dibiayai dengan alasan tertentu.
- *Connection* – koneksi atau hubungan atau lobby dengan pihak perbankan.
- *Commision* – komisi, ada uang lelah kredit diberikan.

Analisa kredit tersebut dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan resiko yang dapat terjadi akibat ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan kreditnya, karena apabila hal tersebut terjadi maka operasi dari bank tersebut akan terganggu atau bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan, yang efeknya akan dirasakan oleh orang banyak.

Pembuat peraturan bank juga ingin tahu pengukuran resiko kredit yang akurat yang terlibat dalam derivatif sehingga persyaratan modal bisa diatur secara optimal. Pelaku pasar ingin tahu bagaimana mengukur resiko kredit untuk mengganti kerugian dengan tepat sehingga bisa terus berperan (Gregory R Duffee, 1996) Jadi resiko kredit bukan hanya diperlukan dan digunakan oleh bank tetapi juga pembuat peraturan bank dan pelaku pasar itu sendiri.

Apabila faktor-faktor diatas dalam analisis kredit sudah dipenuhi, maka menurut kriteria perbankan calon debitur dapat diberi pinjaman. Analisis kredit dari faktor-faktor tersebut dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah, namun pada kenyataannya walaupun analisis kredit telah dilakukan terhadap faktor-faktor tersebut kredit bermasalah tetap ada.

Kredit bermasalah sering dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 27 bulan atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan/ BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah tetapi kredit bermasalah tidak seluruhnya merupakan kredit macet (Subarjo Joyosumarto, 1994). Hal ini juga didukung oleh definisi lain bahwa kredit macet sebagai suatu kredit yang tidak dapat ditagih atau sulit untuk memperoleh perlunasan maupun penyelamatannya. Batasan ini hendaknya tidak dicampuradukan dengan *problem loan* yang didefinisikan (Clarke 1989) :

“ ...it is where repayment is in jeopardy, especially if the expected or anticipated source of repayment is no longer sufficiently available to repay the debt”

Dengan demikian jelas bahwa pengertian *problem loan* tidak hanya mencakup kredit yang kolektibilitasnya “macet”, tetapi juga terdapat pada golongan lainnya, terutama pada golongan “diragukan” (Nurdin Hasibuan 1994).

Kredit macet dalam jumlah besar yang relatif besar atau bahkan informasi yang tidak benar mengenai kredit macet yang dialami bank tertentu, jika tidak segera diambil langkah-langkah penanggulangan dan penyelesaiannya akan menimbulkan kegelisahan, khususnya pada nasabah bank yang bersangkutan dan memungkinkan terjadinya *rush* (Subarjo Joyosumarto, 1994).

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, adanya kredit macet yang cukup besar membawa dampak yang cukup luas, baik dari sisi perbankan (aspek mikro) maupun perekonomian secara nasional (aspek makro).

- Dampak pada sisi perbankan (mikro).

Dari sisi perbankan, kredit macet yang cukup besar akan membawa dampak yang merugikan pada perkembangan usaha dan kesehatan bank. Keadaan tersebut mempengaruhi likuiditas bank, dalam arti bank kemungkinan tidak memenuhi kewajiban segeranya dengan baik. Disamping itu, berkurangnya penerimaan juga mempengaruhi solabilitas dan rentabilitas bank, hal tersebut juga akan mempengaruhi keadaan permodalan.

- Dampak terhadap Perekonomian Nasional (makro)

Mengingat sebagian dana yang dihimpun bank digunakan untuk menutup kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka kemampuan bank dalam memberikan kredit baru menjadi berkurang, sehingga menutup kemungkinan calon debitur baru untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank yang bersangkutan.

Dampak lain, bank akan cenderung terlalu hati-hati dalam memberikan kredit dengan makin selektifnya pemberian kredit sehingga ekspansi pemberian kredit menurun dan proses pemberian kredit cenderung lebih lama dari prosedur normal, hal ini mengakibatkan biaya dana dan bunga kredit menjadi lebih tinggi.

Nurdin Hasibuan (1994) mengatakan bahwa kerugian yang ditanggung karena sebagian atau seluruh kredit macet tidak tertagih, sebenarnya jauh lebih besar jumlahnya daripada kredit macet itu sendiri. Kerugian yang sering kurang diperhatikan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sejak timbul *problem loan*, baik dalam prosesnya menjadi macet maupun setelah kredit itu dinyatakan macet. Biaya-biaya tersebut dapat berupa :

- Biaya hukum, yaitu biaya tenaga ahli (pengacara, konsultan dll.) untuk membela kepentingan bank atas pengurusan kredit macet yang harus ditempuh dengan saluran hukum.
- Biaya administrasi, yaitu biaya intern bank untuk pemeliharaan administrasi kredit macet sampai dengan tertagihnya piutang tersebut.
- Biaya yang berkaitan dengan peraturan, yaitu biaya ekstern bank untuk penyelenggaraan pelaporan kredit macet sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan-peraturan, antara lain pelaporan ke Bank Indonesia, administrasi BUPLN (10% dari nilai likuidasi).

Disamping itu, apabila lebih didalami lagi, masih terdapat kerugian yang sulit dikuantisir berupa hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan (*Opportunity cost*) dan reputasi bank itu sendiri.

Kredit bermasalah tidak timbul seketika, melainkan secara bertahap dimana terjadi penurunan berbagai aspek yang dimiliki nasabah yang berakhir dengan ketidakmampuan nasabah dalam membayar kreditnya.

Bank harus segera mengambil langkah-langkah pengamanan untuk mencegah permasalahan menjadi berkembang atau lebih parah. Gejala atau tanda-tanda awal umumnya dapat dideteksi (Imam Wahjudi, 1994) melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan keuangan nasabah.

Penurunan kualitas rasio-rasio keuangan nasabah memerlukan pengawasan lebih seksama untuk menentukan apakah terdapat permasalahan yang serius atau tidak pada kredit yang diberikan kepada nasabah.

2. Aktivitas rekening yang harus dipantau.

Aktivitas rekening tersebut misalnya : *overdraft*, penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan pola yang ditetapkan dan pembayaran angsuran yang tersendat.

3. Kondisi bisnis nasabah.

Kondisi bisnis nasabah yang perlu dideteksi misalnya : hubungan nasabah dan suplier yang semakin menurun, kehilangan satu/lebih nasabah utama dan harga jual yang terlalu rendah mencapai *break even point* (BEP).

4. Perilaku nasabah.

Perubahan perilaku nasabah dalam menyampaikan segala aktivitas bisnisnya secara terbuka setiap saat kepada bank perlu diwaspadai. Bank, khususnya pejabat kredit harus peka terhadap perubahan diatas dan segera mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.

5. Gejala-gejala ekonomi.

Gejala-gejala tersebut antara lain adalah pemogokan buruh atau pekerja, resesi ekonomi dan kejenuhan pada bisnis tertentu yang secara ekonomi akan mempengaruhi kelangsungan bisnis nasabah.

Peter S Clarke dalam M. Asrof (1994) mengatakan bahwa ada 4 *general early warning signals*, yaitu :

1. *Financial – as detected from financial statements and compliance with loan agreement.*
2. *Management – as determined from meeting with principals.*
3. *Operations – as evidenced from business or plant calls.*
4. *Collateral – as evaluated from monitoring and inspecting collateral.*

Sedangkan *Bank of America* menyebutkan adanya 9 *warning signals* sebagai berikut :

1. *Delays in submitting financial exhibits.*
2. *Declines on deposit balances and a high incidence of overdrafts or return checks.*
3. *Failure to perform on other obligations.*
4. *An inventory glut.*
5. *Delinquent loan payment, past due periods increasing.*
6. *Difficulty in arranging meeting and visits.*
7. *Legal action againsts the business.*
8. *Increasing payables or accruals.*
9. *Negative information from competitors and customers.*

Pokok-pokok penyebab kemacetan kredit secara rinci dapat dijelaskan (Subardjo J, 1994) sebagai berikut :

1. Faktor Intern, antara lain :

- Kebijakan perkreditan yang ekspansif.
- Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
- Itikad kurang baik dari pemilik/pengurus/pegawai bank
- Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit.
- Lemahnya sistem informasi kredit.

2. Faktor Ekstern, yang meliputi :

- Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.
- Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
- Kegagalan usaha debitur.
- Musibah yang terjadi pada debitur atau kegiatan usahanya.

d. Upaya Penyelamatan Kredit Macet

Upaya penyelamatan yang dapat dilakukan oleh bank dalam mengatasi kredit macet adalah sebagai berikut :

- Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang menyangkut jadwal pelunasan atau jangka waktu kredit, termasuk *grace period* atau masa tenggang baik terhadap perubahan besar jumlah angsuran atau tidak.

- Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Perubahan yang dilakukan tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

- Penataan kembali (*restructuring*)

Perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan (injeksi) kredit atau konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi kredit perusahaan. Penataan kembali dapat dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.

e. Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai cara penyelesaian kredit macet bukanlah merupakan hal yang mudah, walaupun telah diketahui latar belakang permasalahannya dan faktor-faktor penyebabnya. Untuk maksud tersebut diperlukan konsep yang menyeluruh dan langkah-langkah yang terpadu dengan sejauh mungkin melibatkan pihak-pihak terkait, baik unsur nasabah/dunia usaha, perbankan serta lembaga-lembaga pemerintah.

Langkah-langkah penyelesaian kredit macet dilaksanakan, baik oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Adapun langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh perbankan saat ini (Subardjo J. 1994) adalah :

1. Penyelesaian langsung oleh bank sendiri, yaitu :

- Restrukturisasi kredit untuk debitur macet yang masih mempunyai prospek usaha dengan melakukan penjadwalan kembali, menetapkan persyaratan baru atau menambah jumlah kredit.
- Mengkonversi kredit macet menjadi penyertaan saham terhadap debitur yang masih mempunyai prospek usaha dan nilai asetnya masih layak.
- Menagih langsung kepada debitur.
- Menguasai barang agunan melalui pembelian dengan cara lelang untuk dijual kembali secepat-cepatnya.

2. Penyelesaian melalui prosedur hukum, yaitu :

- Mengajukan penyelesaian kredit macet kepada pengadilan negeri sebagai perkara perdata dengan proses gugatan.
- Menyerahkan kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPN) untuk dilakukan penagihan (bagi bank-bank persero) setelah kredit dinyatakan macet oleh bank.
- Menggunakan jasa instansi Kejaksaan dalam fungsinya sebagai Pengacara Negara.

3. Penyelesaian oleh pihak lain yaitu dengan menggunakan jasa penagih swasta yang independen.

4. Khusus kepada Bank Pemerintah telah dibentuk Tim Supervisi Kredit Bank Pemerintah (TSKBP) yang beranggotakan pejabat-pejabat Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Tim tersebut bersifat *ad hoc* dalam rangka membantu manajemen Bank Pemerintah menyelesaikan kredit macet.

Imam Wahjudi (1994), memberikan langkah-langkah yang dapat ditempuh bila upaya penyelamatan kurang membawa hasil adalah melalui prosedur hukum sebagai berikut :

1. Kejaksaan

Kejaksaan dapat bertindak mewakili bank-bank milik Pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum bila nasabah debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada bank.

2. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

Dengan adanya penyerahan kepada badan tersebut maka secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih berada sepenuhnya pada BUPLN.

3. Penjualan Agunan (penerapan pasal 1178 ayat 2 KUH perdata)

Kreditur sebagai pemegang hipotik pertama diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum tanpa adanya fiat persetujuan atau bantuan Pengadilan Negeri, apabila nasabah tidak menyelesaikan utang pokok dan bunga sebagaimana mestinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang kredit macet dalam dunia perbankan antara lain:

1. Iswardono Sardjono Permono dan B. Sandro Secundatmo (1993) dalam penelitian tentang “Trauma Kredit Macet Hantui Perbankan” di salah satu bank Pemerintah di Jakarta. Ada tiga variabel yang ditetapkan : Tingkat suku bunga rata-rata, Angka kolektibilitas kredit dan *Cash flow* debitur.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data *time series* triwulanan dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1990, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa; hanya variabel tingkat suku bunga rata-rata yang berpengaruh positif terhadap jumlah kredit macet, sedangkan variabel angka kolektibilitas kredit dan *Cash flow* berpengaruh negatif.

2. Soerono Suryokusumo (1996). “Analisis Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (Sebuah Studi Terapan Pada PT. Bank Pasar Gunung Kinibalu Semarang) “ dalam penelitian ini menggunakan variabel sebagai berikut ; Tingkat bunga rata-rata pinjaman dan Angka kolektibilitas. Sebagai penduga terjadinya kredit macet.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data *time series* semesteran dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1995, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa; untuk kredit macet BPR baik parsial maupun berganda dari variabel tingkat bunga rata-rata pinjaman riil dan kolektibilitas kredit baik berdiri sendiri maupun bersama-sama mempunyai pengaruh secara nyata terhadap jumlah kredit macet BPR.

3. Cara Lown, Stavros Peristiani (1996). "*The behavior of consumer loan rates during th 1990 credit slow down.*" pada *Comercial bank* di Amerika Serikat. Dalam penelitian itu mencoba dikaji hubungan antara suku bunga selama masa kredit macet dengan besar kecilnya bank. Dalam penelitian ini menggunakan variabel sebagai berikut ; Pinjaman Pribadi dan Kredit mobil diduga sebagai penyebab melambatnya kredit pada tahun 1990.

Dari populasi 200 *Comercial bank* di Amerika Serikat, dengan menggunakan *Metode Stratified Sampling* didapat 15 bank sebagai sampel. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data *time series* dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa; penurunan kredit terjadi karena bank besar dengan modal rendah meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman yang lebih tinggi dari rata-rata kredit dibandingkan suku bunga pinjaman yang diberikan bank besar yang bermodal besar.

4. L. Suryanto (1997). “ Analisis Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Artha Gunung Semeru Purwodadi.” Ada 3 variabel yang ditetapkan : Jangka waktu pengembalian kredit, Tingkat bunga pinjaman dan angka kolektibilitas.

Dengan menggunakan *Metode Stratified Random Sampling* dari populasi 419 debitur macet diperoleh 42 sampel, dengan data *cross section* tahun 1996, sedangkan alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitiannya menunjukkan variabel jangka waktu kredit, suku bunga kredit dan kolektibilitas kredit berpengaruh terhadap jumlah kredit macet.

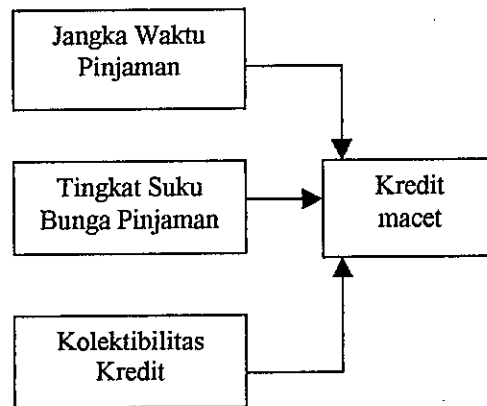
Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut: Persamaannya adalah sama-sama meneliti kredit macet, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel kolektibilitas kredit.

Pada penelitian terdahulu kolektibilitas kredit hanya melihat kemampuan membayar angsuran bunga saja sedangkan pada penelitian ini kolektibilitas kredit dilihat dari kemampuan membayar angsuran pokok atau bunga kredit.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan pada teori-teori ekonomi yang ada dan pengalaman di lapangan serta dengan didukung penelitian terdahulu maka dikembangkan suatu model baru tentang variabel yang berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet. Variabel tersebut adalah :

1. Jangka Waktu Pinjaman.
2. Tingkat Suku Bunga Pinjaman.
3. Kolektibilitas Kredit.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3.1. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai konsep-konsep yang dapat dinilai benar atau salah untuk diujikan secara empiris (C. William E. Mory, 1996). Sedangkan menurut Suprpto (1993), dikatakan bahwa hipotesis adalah suatu proposisi atau anggapan yang dapat benar namun juga dapat salah dan sering digunakan sebagai dasar pembuat keputusan/pemecahan persoalan ataupun untuk penelitian lebih lanjut. Jadi hipotesis merupakan suatu rumusan yang menyatakan adanya hubungan tertentu antar dua variabel atau lebih.

Hipotesis ini bersifat sementara dalam arti dapat diganti dengan hipotesis yang lain yang lebih tepat dan lebih benar berdasarkan pengujian. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : *Jangka waktu pinjaman berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet.*

H2 : *Tingkat suku bunga pinjaman berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet.*

H3 : *Kolektibilitas kredit berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet.*

2.3.2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, ingin diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan faktor-faktor yang diduga menyebabkan terjadinya kredit macet diantaranya adalah :

1. Jangka waktu pinjaman, adalah waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman. Di BPR BKK Dawe, Kudus jangka waktu untuk kredit modal kerja maksimum 12 bulan sedangkan untuk kredit konsumsi jangka waktu kredit yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan membayar debitur maksimum 42 bulan.
2. Tingkat suku bunga pinjaman, adalah biaya kredit yang harus dibayar bersama angsuran oleh debitur. Di BPR BKK Dawe, Kudus besarnya bunga berkisar antara 24% sampai dengan 48%.

3. Kolektibilitas kredit, adalah keadaan pembayaran angsuran pokok atau bunga kredit oleh nasabah dibandingkan dengan kredit yang diberikan yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 terdapat 4 golongan kolektibilitas kredit, yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari lapangan untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Data primer ini didapatkan secara langsung dari BPR BKK Dawe, Kudus dan Bank Indonesia. Periode data yang digunakan adalah dari bulan Agustus 1999 sampai dengan Juli 2000, karena pada periode tersebut terjadi peningkatan jumlah kredit macet yang relatif besar bahkan pada bulan Juni dan Juli 2000 melebihi 34%.

3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh pihak lain atau diluar peneliti yang berkaitan dengan masalah kredit macet yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya melainkan sudah diolah, yang berupa catatan atau arsip, serta studi pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

3.2.2 Metode Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan jalan penulis melakukan pengamatan atau ikut serta secara langsung ke dalam obyek yang diteliti.

3.2.3 Penelitian Kepustakaan

a. Studi Pustaka

Metode studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan obyek yang akan diteliti seperti literatur, jurnal-jurnal dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan dan sumber lain.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan jalan mencatat dan menyalin data yang sudah ada pada perusahaan.

3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini populasi dari debitur kredit macet bulan Agustus 1999 sampai dengan bulan Juli 2000 sebanyak 110 debitur, dengan perincian debitur untuk modal kerja 90,62% dan nasabah untuk konsumsi 9,38%. Pekerjaan dari para debitur meliputi; untuk Swasta 90,62 %, untuk pegawai negeri 9,38 %.

Data yang digunakan adalah data cross section karena apabila digunakan data time series diperlukan data beberapa tahun, sedangkan data yang tersedia pada BPR BKK Dawe, Kudus tidak memenuhi syarat untuk digunakan data penelitian secara time series.

Penentuan sampel digunakan *Metode Simple Random Sampling* dengan melalui tabel *Nomogram Harry King* (Sugiyono, 1999). Dengan jumlah populasi sebesar 110 debitur dan dengan tingkat kepercayaan sampel terhadap populasi 90% atau tingkat kesalahan $\alpha = 10\%$, maka jumlah sampel yang diambil adalah $0,31 \times 110 = 34,1$ debitur atau dibulatkan menjadi 35 debitur yang diambil sebagai sampel.

3.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan :

3.4.1 Analisis Rasio Kolektibilitas

Yaitu dengan membandingkan antara angsuran pokok atau angsuran bunga dengan kredit yang disalurkan untuk tiap nasabah yang menjadi sampel.

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda dengan Logaritma Natural

Model persamaan yang digunakan adalah model logaritma natural ($\log n$ atau \ln) dengan menggunakan variabel dependen (terikat) adalah kredit macet (Y) dan variabel independen (bebas) adalah :

$X_1 =$ jangka waktu pinjaman

$X_2 =$ tingkat suku bunga pinjaman

$X_3 =$ angka kolektibilitas kredit

Bentuk persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$\ln Y = b_0 + b_1 \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + b_3 \ln X_3$$

Dimana ;

Y = kredit macet

b_0 = konstanta

b_1 = koefisien parameter X_1

b_2 = koefisien parameter X_2

b_3 = koefisien parameter X_3

X_1 = jangka waktu pinjaman

X_2 = tingkat suku bunga pinjaman

X_3 = angka kolektibilitas kredit

Sebelum disimpulkannya hasil regresi tersebut untuk mengetahui validitas dari masing-masing hasil regresi tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Evaluasi Ekonomi, yaitu evaluasi dengan membandingkan asumsi-asumsi teori-teori ekonomi dengan hasil yang diperoleh.
- b. Evaluasi Ekonometrik, yaitu evaluasi penyimpangan klasik dari metode Ordinary Least Square (OLS). Evaluasi ini ada tiga pengujian yang meliputi :
 - Uji Multikolinearitas, adanya hubungan yang sempurna antara semua variabel bebas dalam model regresi.
 - Uji Autokorelasi, adanya hubungan antara anggota-anggota serangkaian observasi (time series ataupun cross section).

- Uji Heteroskedastisitas, adanya varian yang berbeda yang dapat membiaskan hasil yang telah dihitung.
- c. Evaluasi Statistik dengan melihat nilai dari t, F dan R^2

3.4.3 Analisis Kualitatif

Pada analisis ini penekanan lebih lanjut pada penyelesaian kredit macet berupa:

Penyelamatan:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang menyangkut jangka waktu kredit termasuk *grace period*
- b. Penataan kembali (*reconditioning*) persyaratan kredit, perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja
- c. Reorganisasi dan rekapitalisasi (*reorganization and recapitalization*),
- d. kerjasama dengan aparat pemerintahan setempat

Penyelesaian:

- a. penyelesaian menurut hukum
- b. Menagih langsung kepada debitur
- c. Menguasai barang agunan
- d. menggunakan jasa penagih swasta yang independen

BAB IV

GAMBARAN UMUM BPR BKK DAWE, KUDUS

4.1 Sejarah BPR BKK Dawe Kudus

Badan Kredit Kecamatan Dawe Kudus dalam pendiriannya di berdasarkan pada surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Tengah :

Tanggal : 4 September 1969

Nomor : No. Dsa G 226/1969 jis tanggal Nopember 1970.
8/ 2 / 4

No. Dsa G 323/1970 Perda 11 tahun 1981
12/ 19 /24

Permodalan pertama kali BKK Dawe sebesar Rp. 1.000.000,- dimana dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah lewat BPD sebagai kredit investasi.

Pada tahun 1991 ditingkatkan fungsinya menjadi Bank Perkreditan Rakyat dengan nama Bank Perkreditan Rakyat BKK Dawe Kudus, berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia :

Tanggal : 8 Oktober 1991

No/Tgl. Izin Usaha : 364/KM.13/1991 tanggal. 08 – 10 – 1991

No. NPWP : 1.245.452.6.506

BPR BKK Dawe Kudus beralamat di jalan Cendono – Gebog Dawe Kudus, Kelurahan Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Sejalan dengan itu juga terjadi perubahan struktur permodalan menjadi :

Modal Dasar : Rp. 150.000.000,-

Modal Disetor ;

- Tingkat I	: Rp. 12.178.475,-
- Tingkat II	: Rp. 8.524.933,-
- BPD	: Rp. 3.653.543,-
Jumlah	: Rp. 24.356.951,-

Pada tanggal 03 Januari 2000 terjadi perubahan terhadap Anggaran Dasar dengan Modal Dasar sebesar Rp. 500.000.000, berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 1995 dengan tambahan setoran modal sebesar Rp. 138.823.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Tingkat I	: Rp. 88.823.000,-
- Tingkat II	: Rp. 50.000.000,-
Jumlah	: Rp. 138.823.000,-

Sehingga Modal Disetor BPR BKK Dawe Kudus sampai dengan Oktober 2000 menjadi sebesar Rp. 163.179.951,- dengan rincian:

- Rp. 24.356.951,- (Modal Disetor awal)
- Rp. 138.823.000,- (Modal Disetor tambahan)

BPR BKK Dawe Kudus memiliki Sumber daya manusia (SDM) sebanyak 10 orang karyawan, seperti yang terlihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Sumber Daya Manusia
BPR BKK Dawe Kudus
(Juli 2000)

Tingkatan Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah	Persentase
1. DIII/Sarjana Muda	1	0	1	10
2. SLTA/SMEA	5	2	7	70
3. SMP	1	1	2	20
Jumlah	7	3	10	100

Sumber : BPR BKK Dawe, Kudus (diolah)

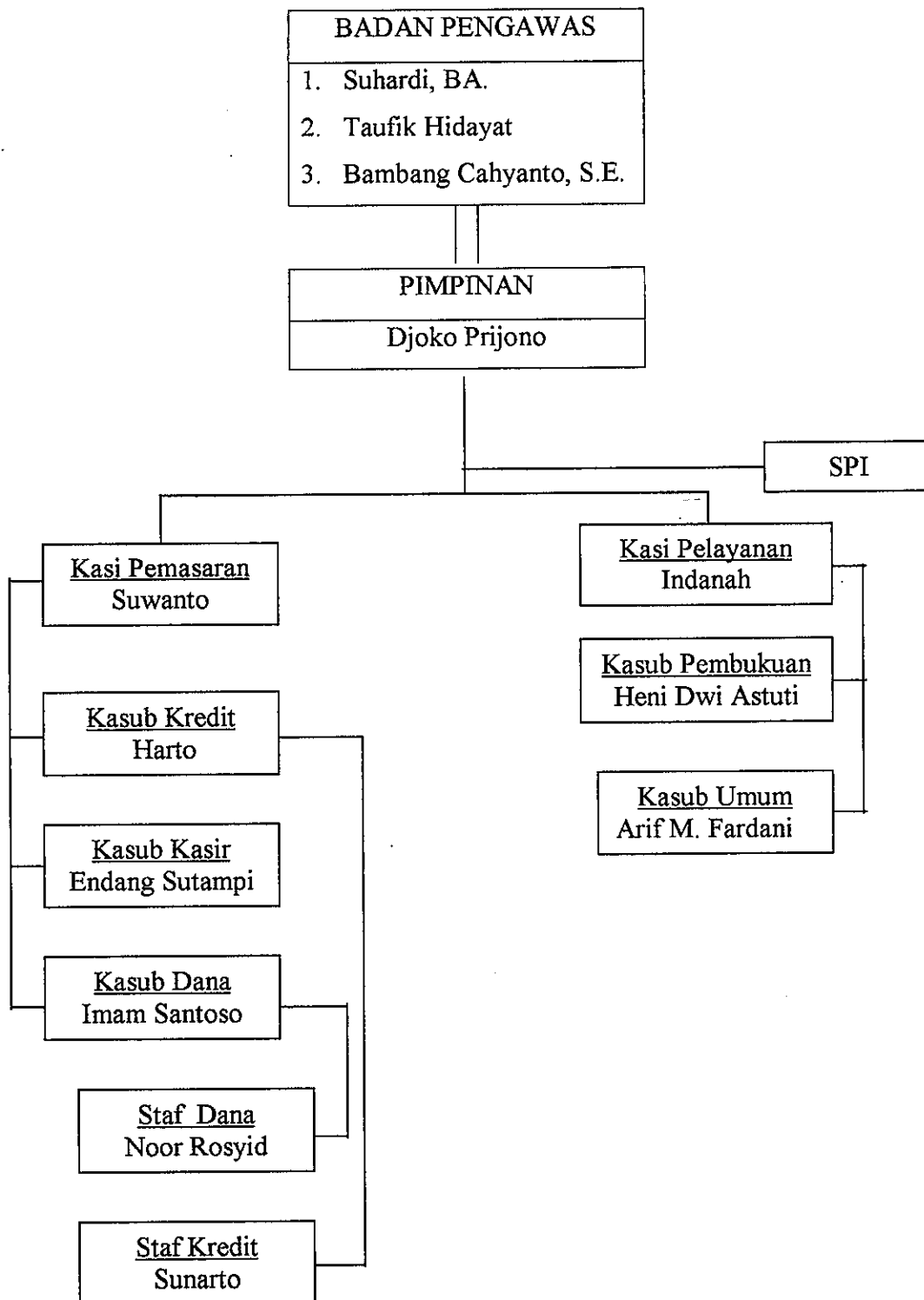
4.2 Struktur Organisasi beserta Tugas dan Wewenang

4.2.1 Struktur Organisasi BPR BKK Dawe, Kudus

Struktur organisasi yang dipergunakan oleh BPR BKK Dawe, Kudus menggunakan struktur organisasi segitiga vertikal, hal ini dikarenakan organisasinya masih kecil, organisasinya masih sederhana, jumlah karyawan masih sedikit, sehingga mempunyai kebaikan dalam hal tingkatan-tingkatan karyawan yang jelas, garis komando yang jelas serta pertanggung-jawaban yang jelas pula. Struktur organisasi BPR BKK Dawe Kudus dapat dilihat pada gambar 4.1.

Struktur organisasi BPR BKK Dawe Kudus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor : 11 tahun 1981 dan Surat Keputusan Susunan Pengurus Nomor : 581/044/1992. Tanggal : 16 Nopember 1992, adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPR BKK Dawe Kudus.



Sumber : BPR BKK Dawe, Kudus

4.2.2 Tugas Dan Wewenang

1. Badan Pengawas:

Menetapkan kebijaksanaan umum bank dan mengawasi kegiatan operasional yang di laksanakan oleh Pimpinan sesuai dengan surat yang diputuskan oleh Gubernur kepala daerah tingkat I Jateng No: 581/118/1992

2. Pimpinan

Memimpin dan menjalankan pengurusan dan pengelolaan BPR BKK sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan temuan yang di gariskan oleh badan pengawas sesuai dengan anggaran dasar BPR BKK Dawe Kudus.

3. Kepala Seksi Pemasaran

- Kepala Seksi Pemasaran membawahi Kepala Sub Bidang Kredit, Kepala Sub Bidang Kasir, Kepala Sub Bidang Dana.
- Menghimpun dana, menyalurkan kredit dan memasarkan jasa-jasa.
- Menyusun rencana kerja dan anggaran, mengevaluasi dan bertanggung jawab untuk mencapainya.
- Menyusun laporan intern dan ekstern dalam bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan.
- Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas/ kegiatan petugas dibawahnya
- Dalam melaksanakan tugas seksi pemasaran bertanggung jawab terhadap Pimpinan.

4. Kepala Seksi Pelayanan

- Kepala Seksi Pelayanan membawahi Kepala Sub Bidang Pembukuan, Kepala Sub Bidang Umum.
- Pembukuan, kesekretariatan, umum dan Personalia
- Menyusun rencana kerja dan anggaran, mengevaluasi dan bertanggung jawab untuk mencapainya.
- Menyusun laporan untuk kepentingan intern dan ekstern dalam bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan.
- Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan petugas dibawahnya.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi pelayanan bertanggung jawab kepada pimpinan.

5. Kepala Sub Bidang Kredit

Kepala Sub Bagian ini membawahi staf kredit yang menangani catatan kredit serta pelunasannya.

Tugas dan wewenangnya adalah :

- Dengan persetujuan Direktur menentukan besarnya kredit, tingkat bunga maupun jangka waktu.
- Membina, membuat, serta mengusahakan pemasaran kredit.
- Mengontrol administrasi setoran dan cicilan dari petugas kredit.
- Meninjau kembali serta menganalisis aplikasi kredit, terutama untuk kredit konsumsi.

- Melakukan pengontrolan antara administrasi kredit dan dokumentasi kredit untuk setiap debitur sesuai dengan akad kreditnya.

6. Kepala Sub Bidang Dana

Kepala Sub Bagian Dana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf dana.

Sedangkan tugas dan wewenangnya adalah :

- mencari dan sekaligus mengembangkan dana.
- Membuat analisis tentang penggunaan dana.
- Mengadakan penelitian tentang dana yang dicairkan

7. Kepala Sub Bidang Pembukuan

- mengatur dan mengkoordinasikan seksi personalia dan umum / sekretaris.
- Mengupayakan agar barang-barang milik kantor / bank dicatat sebagaimana mestinya.
- Menangani tugas-tugas personalia.
- Mengontrol administrasi milik bank

4.3 Pengurus

4.3.1 Badan Pengawas

Badan pengawas di BPR BKK Dawe Kudus terdiri dari tiga personil, rincian mengenai susunan Badan Pengawas dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Susunan Badan Pengawas
BPR BKK Dawe Kudus
(Juli 2000)

No	Nama	Jabatan
1	Suhardi, BA	Ketua Banwas
2	Taufik Hidayat	Anggota Banwas
3	Bambang Cahyanto, S.E	Anggota Banwas

Sumber : BPR BKK Dawe Kudus

4.3.2 Pimpinan Dan Kepala Seksi

Pimpinan dan kepala seksi pada masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Susunan Pimpinan Dan Kepala Seksi
BPR BKK Dawe Kudus
(Juli 2000)

No	Nama	Jabatan
1	Djoko Prijono	Pimpinan
2	Suwanto	Kasi Pemasaran
3	Indanah	Kasi Pelayanan

Sumber : BPR BKK Dawe Kudus.

4.4 Pemilik

Komposisi kepemilikan dari BPR BKK Dawe Kudus secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Komposisi Kepemilikan
BPR BKK Dawe, Kudus
(Juli 2000)

No	Nama	Nominal	Persentase
1	Tingkat I	Rp. 101.001.475,-	62
2	Tingkat II	Rp. 58.524.933,-	36
3	BPD	Rp. 3.653.543,-	2
	Jumlah	Rp. 163.179.951,-	100

Sumber : BPR BKK Dawe, Kudus.

4.5 Keuangan

Gambaran mengenai kondisi keuangan BPR BKK Dawe, Kudus, akan dipaparkan pada beberapa hal, yang mencakup tentang : total kredit (kredit yang diberikan kepada nasabah), perolehan laba, total modal yang disetor, dan dana dari pihak ketiga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5.
Jumlah Kredit dan Perolehan Laba
BPR BKK Dawe, Kudus 10 tahun Terakhir
(Juli 2000)

Tahun	Jumlah	
	Total Kredit	Perolehan Laba
1990	Rp. 138.700.000	Rp 3.647.000
1991	Rp. 118.500.000	Rp 1.981.000
1992	Rp. 99.700.000	Rp 3.427.000
1993	Rp. 257.000.000	Rp 4.100.000
1994	Rp. 350.200.000	Rp 4.627.000
1995	Rp. 486.600.000	Rp 7.125.000
1996	Rp. 535.600.000	Rp 7.659.000
1997	Rp. 484.300.000	Rp 2.208.000
1998	Rp. 356.000.000	Rp 353.000
1999	Rp. 314.000.000	Rp 333.000
juli-00	Rp. 324.738.000	Rp 2.281.000

Sumber : data BPR BKK Dawe, Kudus (diolah)
 Jumlah Kredit yang dihapus buku

Tahun 1994 sebesar Rp. 4.323.000
Tahun 1997 sebesar Rp. 13.844.000

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa pada tahun 1998 terjadi penurunan laba yang sangat drastis dari Rp. 2.208.00 di tahun sebelumnya (1997) menjadi Rp. 353.000 (1998), dimana penurunan itu tidak seimbang dengan penurunan total kredit, yaitu sebesar Rp. 484.300.000 (1997) turun menjadi Rp. 356.000.000 ditahun 1998, atau dapat dikatakan total kredit pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 27 % dari tahun sebelumnya (1997), sementara perolehan laba turun sebesar 84%, meskipun ditahun 1997 ada kredit sebesar Rp. 13.844.000 dihapus buku.

Pada tabel berikutnya akan disajikan jumlah modal yang disetor dan dana dari pihak ketiga. Untuk lebih jelasnya, dapat disimak pada tabel 4.6 berikut ini:

UPT-PUSTAK-UNDIP

Tabel 4.6.
Jumlah Modal Disetor Dana Pihak Ketiga
BPR BKK Dawe, Kudus.
(Juli 2000)

Tahun	Jumlah		Keterangan
	Modal Disetor	Dana Pihak Ketiga	
1991	Rp. 12.178.475 Rp. 8.524.933 Rp. 1.653.543		TINGKAT I TINGKAT II BPD
1993	Rp. 2.000.000		BPD
1994		Rp. 3.000.000	
1995		Rp. 56.500.000	
1996		Rp. 37.500.000	
1997		Rp. 257.000.000	
1998		Rp. 140.000.000	
1999		Rp. 44.500.000	
MAR 2000	Rp. 88.823.000	Rp. 9.500.000	TINGKAT I TINGKAT II
Jul 2000	Rp. 50.000.000	Rp.213.322.000	

Sumber : data BPR BKK Dawe, Kudus. (diolah)

4.6 Produk Yang Ditawarkan

BPR BKK Dawe Kudus seperti pada umumnya lembaga perbankan lainnya dengan menawarkan produk-produk berupa : tabungan, dan kredit.

4.6.1 Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek. Ada dua jenis tabungan yang ditawarkan, yaitu meliputi :

- Tabungan wajib merupakan potongan sebesar 5% dari plafon pinjaman.
- Tabungan sukarela atau Tamades dari penabung umum.

4.6.2 Kredit

Salah satu produk yang ditawarkan untuk penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Pada produk Kredit ini jangka waktu yang diberikan rata-rata 17 bulan.

BAB V

ANALISIS DATA

5.1 INFORMASI DATA

Setelah melakukan penentuan sampel (*sampling*) dengan metode *Simple Random Sampling* yang mempergunakan tabel *Nomogram Harry King* (Sugiyono, 1999), diperoleh sampel sebanyak 35 debitur yang kreditnya macet. Dalam penelitian ini kredit macet diproksikan menjadi jumlah kredit macet dari si debitur, dan diberi kode Y, sedangkan jangka waktu kredit, tingkat bunga dan angka kolektibilitas masing-masing dengan kode X_1 , X_2 , dan X_3 . Sebagaimana lampiran A. Oleh karena data yang tersedia memiliki perbedaan dalam satuan (bln, Rp, %) maka model tersebut terlebih dahulu dirubah dalam bentuk model log natural (ln). Alasannya model ini mengasumsikan bahwa koefisien elastisitas antara Y dan X adalah konstan sehingga model ini disebut model elastisitas konstan (Gunawan Sumodiningrat, 1998). Setelah model tersebut di log naturalkan kemudian baru dilakukan analisis regresi linier berganda, sehingga diperoleh :

- a. log natural (ln) kredit macet atau $\ln Y$
- b. log natural (ln) jangka waktu kredit atau $\ln X_1$
- c. log natural (ln) tingkat bunga atau $\ln X_2$
- d. log natural (ln) angka kolektibilitas atau $\ln X_3$

Hasil log natural (ln) untuk variabel terikat ($\ln Y$) maupun variabel bebas ($\ln X_1$, $\ln X_2$, $\ln X_3$) dapat dilihat pada lampiran B.

5.2. HASIL PERSAMAAN REGRESI YANG DIPEROLEH

Dengan bantuan program SPSS versi 10.00 maka persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\ln Y = 2,524 - 0,717 \ln X_1 + 0,959 \ln X_2 - 0,286 \ln X_3$$

(-3,441) (12,356) (-2,506)

Angka dalam kurung menggambarkan t hitung

$$R^2 = 0,865 \qquad DW = 1,619$$

Dimana,:

- a. $\ln Y$ adalah jumlah kredit macet
- b. 2,524 adalah intercept / konstanta
- c. - 0,717 adalah koefisien parameter X_1
- d. 0,959 adalah koefisien parameter X_2
- e. - 0,286 adalah koefisien parameter X_3

Pada model diduga masih terdapat penyimpangan asumsi klasik yang dapat mengurangi validitas hasil perhitungan regresi maka perlu dilakukan pengujian sebagai berikut :

- a. evaluasi ekonomi
- b. evaluasi ekonometrik
- c. evaluasi statistik

5.2.1 Evaluasi Ekonomi (Apriori)

Koefisien regresi diberi simbol X_1 , X_2 , X_3 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Koefisiensi X_1 (jangka waktu) bertanda negatif, artinya apabila jangka waktu kredit diperpanjang maka jumlah kredit macet akan berkurang.
- b. Koefisien parameter X_2 (tingkat suku bunga pinjaman) bertanda positif artinya semakin tinggi tingkat suku bunga kredit berarti semakin besar kemungkinan terjadinya kredit macet.

- c. Koefisien regresi X_3 ternyata negatif, artinya apabila angka kolektibilitas kredit yang diperoleh besar maka jumlah kredit macet akan semakin kecil.

5.2.2 Evaluasi Ekonometrik

Setelah melakukan evaluasi ekonomi, tahap selanjutnya perlu dilakukan pengujian penyimpangan klasik dari metode Ordinary Least Square (OLS) sebelum dilakukan interpretasi atas hasil regresi. Untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang dihasilkan mengandung penyimpangan asumsi klasik yang menyebabkan daya ramal atau penaksir dari regresi menjadi tidak tepat. Ada tiga macam pengujian yang perlu ditampilkan yaitu: uji terhadap multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi. Konsekuensi adanya multikolinearitas adalah koefisien regresi variabel tidak tertentu dan kesalahan menjadi tidak terhingga. Dalam menguji kemungkinan terjadinya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan mendeteksi R^2 yang tinggi (0,70 ke atas) namun tidak satupun atau sangat sedikit koefisien regresi yang signifikan secara statistik atas dasar pengujian t yang konvensional (Damodar Gujarati, 1995).

Dari hasil persamaan regresi :

$$\begin{aligned} \text{Ln}Y &= 2,524 - 0,717 \text{ ln } X_1 + 0,959 \text{ ln } X_2 - 0,286 \text{ ln } X_3 \\ &\quad (-3,441) \quad (12,356) \quad (-2,506) \end{aligned}$$

Angka dalam kurung menggambarkan t hitung

$$R^2 = 0,865 \quad \text{DW} = 1,619$$

Di mana $R^2 = 0,865$ sedangkan variabel bebas X_1, X_2 dan X_3 signifikan secara statistik dengan taraf nyata 0,05 % dengan melakukan uji dua arah.

Tabel 5.1 Hasil Uji t

Variabel Bebas	t hitung	t tabel	Kesimpulan
Ln kol	-2,506	-2,042	Signifikan
Ln jangka waktu	-3,441	-2,042	Signifikan
Ln Tingkat bunga	12,356	2,042	Signifikan

Sumber : Lampiran C

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model karena t statisitk > dari t tabel. Pengujian terhadap multikolenearitas dapat dilihat pada matrik korelasi berikut ini :

Tabel 5.2 Coefisient Correlations

Model			ln kol	ln suku bunga	ln jw
1	Corelations	ln kol	1.000	.059	-.111
		ln suku bunga	.059	1.000	-.656
		ln jw	-.111	-.656	1.000

a. Dependent Variable : ln kredit

Petunjuk praktis umum adalah bahwa korelasi antara variabel bebas yang berada pada selang $-0,70$ dan $0,70$ tidak menyebabkan masalah multikolenearitas. Dengan patokan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model di atas tidak terkena multikolinearitas (Robert D. Mason dan Douglas A. Lind, 1999)

Uji Autokorelasi

Ada atau tidaknya korelasi (hubungan) antara anggota-anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data time series) atau ruang (seperti dalam data cross section) dapat diketahui dengan pengujian Autokorelasi. Konsekuensi adanya autokorelasi adalah selang keyakinan menjadi

besar serta varian dan kesalahan standar akan ditaksir terlalu rendah. Pendekatan gejala ini dilakukan dengan Durbin Watson Test. Jika DW adalah nilai Durbin Watson, d_U dan d_L adalah nilai kritis, maka dapat disimpulkan :

- $d < d_L$: menolak H_0 , yang berarti ada autokorelasi.
- $d < 4 - d_L$: menolak H_0 , yang berarti ada autokorelasi.
- $d_U < d < 4 - d_U$: tidak menolak H_0 , yang berarti tidak ada autokorelasi.
- $d_L \leq d \leq d_U$ atau $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$ pengujian tidak menyakinkan.

(Damodar Gujarati, 1995).

Dari hasil analisa Durbin Watson (DW) yang diperoleh sebesar 1,619 (lampiran C). Dengan observasi (n) = 35, variabel bebas (k) = 3, pada tingkat penting 0,001; diperoleh nilai $d_U = 1,44$ dan $d_L = 1,08$. Karena $d_U < 1,619 < 4 - d_L$ atau $1,44 < 1,619 < 2,56$ maka dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui adanya varian yang berbeda yang dapat membiaskan hasil yang telah dihitung dapat diketahui dengan pengujian heteroskedastisitas, konsekuensi yang timbul adalah adanya formula OLS akan menaksir terlalu rendah varian yang sesungguhnya. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan dengan menggunakan uji Park, dimana dalam uji ini kita melakukan prosedur dua tahap. Dalam tahap pertama kita melakukan regresi OLS dengan tidak memandang persoalan heterokedastitas.

Kita memperoleh residual dari regresi ini dan kemudian dalam tahap kedua kita melakukan regresi atas nilai residual terhadap variabel independent.

Jika dilakukan uji t pada variabel independent terhadap variable residual dari dependen ternyata menunjukkan hasil signifikan secara statistik, maka ini menyimpulkan bahwa dalam data terdapat heteroskedastisitas. Apabila ternyata tidak signifikan, maka asumsi heteroskedastisitas dapat diterima.

Tabel 5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel tak bebas	t hitung	t tabel	P value	Kesimpulan
Ln kol	0.000	2,042	1.000	Tidak ada heteroskedastisitas
Ln jangka waktu	-0.001	-2,042	0.999	Tidak ada heteroskedastisitas
Ln Tingkat bunga	-0.006	-2,042	0.995	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber : Lampiran D

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas.

5.2.3 Evaluasi Statistik

Dari hasil uji statistik terhadap model regresi berganda di atas maka dapat diketahui bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi OLS klasik yaitu dengan tidak terdapatnya penyimpangan asumsi klasik, sehingga persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian berikutnya.

Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji-t)

Pengujian untuk melihat apakah secara individual, independent variabel memiliki pengaruh terhadap dependent variabel, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Pengujian korelasi secara individual sebagai berikut (Gujarati 1988) :

$H_0 : b_i = 0$ independent variabel secara individual tidak berpengaruh terhadap dependent variabel.

$H_a : b_i \neq 0$ independent variabel secara individu berpengaruh terhadap dependent variabel.

Persyaratan uji :

$t_{hitung} < t_{tabel}$: H_0 diterima , H_a ditolak

$t_{hitung} > t_{tabel}$: H_0 ditolak, H_a diterima

Dengan melihat p value pada print out komputer (lampiran C) dan nilai p value pada tingkat kepercayaan 95 % ($\alpha = 5\%$), hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4 Hasil Uji Regresi

Variabel Bebas	t hitung	t tabel	P value	Kesimpulan
ln kol	-2,506	-2,042	0.018	Signifikan
ln jangka waktu	-3,441	-2,042	0.002	Signifikan
ln Tingkat bunga	12,356	2,042	0.000	Signifikan

Sumber: Lampiran C

Dari hasil pada tabel 5.3 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai statistik yang signifikan. Dengan demikian maka semua variabel secara individual berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

Pengujian Koefisien Korelasi secara Simultan (Uji F)

Pengujian untuk mengetahui apakah independent variabel secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap dependent variabel. Hipotesa dari analisa ini adalah :

H_0 : $b_i = 0$ independet variabel secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap dependent variabel.

H_a : $b_i \neq 0$, independent variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap dependent variabel.

Sedangkan pengujiannya dilakukan dengan :

- a. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$: independent variabel secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap dependent variabel.
- b. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$: independent variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap dependent variabel.

Secara bersama-sama independent variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap dependent variabel. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F_{hitung} nya sebesar 66,039 (lampiran C) lebih besar dari F_{tabel} yaitu sebesar 2,92 pada tingkat kepercayaan 95 % ($\alpha = 5\%$) dan df dengan pembilang $(k-1) = 3$ dan penyebut $(N-K) = 32$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel X_1, X_2 , dan X_3 signifikan berpengaruh terhadap dependent variabel.

Untuk mengetahui urutan pengaruh masing-masing independent variabel (X_1, X_2 , dan X_3) ditempuh dengan mencari " β (beta) coefficient". Hal tersebut dilakukan karena independent variabelnya dalam persamaan regresi belum sejenis.

Untuk mencari urutan pengaruh harus dimurnikan dahulu dengan menghitung " β coefficient" (Lehman, hal. 528, 1989) yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Urutkan koefisien regresi dan model log natural dari yang kuat ke yang lemah.
- b. Cari standar deviasi (SD) masing-masing variabel, baik variabel terikat maupun variabel bebas atau : SD untuk Y, X_1 , X_2 , dan X_3 .
- c. Hitung dengan menggunakan rumus :

$$\beta \text{ coefficient} = \text{koefisien regresi} \times \frac{\text{SD masing masing variabel bebas}}{\text{SD variabel terikat}}$$

Dengan melihat hasil perhitungan di lampiran E, ditemukan bahwa :

Koefisien β untuk $X_1 = -0,3026$; untuk $X_2 = 1,0828$; sedangkan untuk $X_3 = -0,1666$. Atas dasar perhitungan " *β coefficient*" maka urutan dominasi pengaruh independent variabelnya adalah : X_2 (tingkat bunga), X_1 (jangka waktu), X_3 (kolektibilitas) terhadap dependent variabel.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini menunjukkan kemampuan model di dalam menerangkan variasi perubahan variabel terikatnya. R^2 nilainya $0 \leq R^2 \leq 1$, makin tinggi kemampuan model dalam menerangkan variasi perubahan model terikatnya. Bila nilai R^2 adalah satu berarti pencocokan sempurna, apabila nilai R^2 sama dengan nol berarti tidak ada hubungan dependent variabel dengan independent variabel. Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa semua variabel bebas signifikan sebagai estimator besarnya perubahan kredit macet, terbukti dengan nilai koefisien determinasi (R^2 yang cukup tinggi sebesar 0,865, artinya independent variabel dalam model tersebut dapat menerangkan perubahan kredit macet selama periode penelitian sebesar 86.5% sedangkan sisanya sebesar 13.5% dipengaruhi oleh variabel di luar model.

5.3 PENGARUH BEBERAPA VARIABEL BEBAS (X_1 , X_2 , DAN X_3) TERHADAP KREDIT MACET (Y)

5.3.1 Jangka Waktu Kredit (In X_1)

Jangka waktu kredit (In X_1) nilai koefisiennya sebesar - 0,717. Artinya apabila jangka waktu kredit diperpanjang 1% maka jumlah kredit macet akan turun sebesar 0,717 %, begitu juga sebaliknya apabila jangka waktu kredit diperpendek maka jumlah kredit macet akan naik sebesar 0,717%, dengan asumsi faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan.

5.3.2. Tingkat Bunga Kredit ($\ln X_2$)

Tingkat bunga nilai koefisiennya sebesar 0,959, artinya apabila tingkat suku bunga kredit naik 1 % maka jumlah kredit macet akan naik pula sebesar 0,959. Begitu juga sebaliknya apabila tingkat suku bunga kredit diturunkan sebesar 1 % maka jumlah kredit macet akan turun pula sebesar 0,959.

Karena tingkat suku bunga kredit berpengaruh positif terhadap peningkatan kredit macet maka untuk dapat mengurangi jumlah kredit macet perlu dilakukan kebijakan penurunan tingkat suku bunga kredit. Penurunan tingkat suku bunga kredit tersebut tetap harus memperhatikan tingkat suku bunga pasar dan tingkat suku bunga kredit yang diberikan pesaing.

5.3.3 Kolektibilitas Kredit ($\ln X_3$)

Kolektibilitas kredit merupakan indikator kemampuan bank untuk mengelola nasabahnya. Tingginya angka kolektibilitas kredit menunjukkan bank mampu dalam mengelola kreditnya karena tingkat pembayaran angsuran pokok dan bunga yang diperoleh tinggi.

Kolektibilitas kredit dapat diperoleh dengan jalan membagi pendapatan bunga/angsuran pokok dengan kredit yang disalurkan untuk setiap nasabah sampel dalam %. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa koefisien regresi untuk kolektibilitas kredit adalah - 0,286. Tanda negatif (-) artinya kolektibilitas kredit mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah kredit macet, apabila kolektibilitas kredit naik sebesar 1 % maka kredit macet akan turun 0,286 %.

5.4. ANALISIS KUALITATIF

Analisis selanjutnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Akan tetapi sebelum pada analisis yang ditekankan pada upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian kredit macet tersebut, perlu beberapa tinjauan pada apa yang menjadi penyebab, upaya serta kendala penanganan pada masalah kredit macet di BPR BKK Dawe, Kudus.

Beberapa faktor yang dapat teridentifikasi menyebabkan kredit menjadi macet antara lain meliputi faktor intern dan faktor esktern. Faktor intern meliputi lemahnya pengawasan atau pembinaan bank terhadap debitur dan kurangnya pemenuhan persyaratan-persyaratan kredit yang menyebabkan sebagian pemberian kredit tidak didukung dengan analisis kemampuan pengembalian kredit dan hanya menilai barang jaminan. Hal tersebut berdampak pada kurangnya tanggung jawab debitur dalam pelunasan kewajibannya. Pada faktor ekstern meliputi :

- 1) Kemampuan debitur dalam pengmbalian kredit yang menurun karena usahanya mengalami kerugian atau bankrut.
- 2) Itikad debitur yang kurang baik dalam pengembalian fasilitas kreditnya.

BPR BKK Dawe, Kudus telah dan akan berupaya dalam penanganan kredit macet, upaya-upaya itu meliputi :

- Penagihan dari rumah ke rumah yang telah berjalan sampai saat ini dan akan datang.
- Panggilan surat peringatan tagihan.
- Penyelesaian melalui dinas terkait, yaitu Pemerintah Desa.
- Pemberian target karyawan dalam penanganan kredit macet.

- Penyelesaian dengan jalan penjualan jaminan.

Dalam melakukan upaya-upaya diatas ternyata perusahaan juga menemukan beberapa masalah atau hambatan yang perusahaan hadapi, hambatan itu meliputi :

- Sebagian debitur tidak jelas identitasnya, sehingga pelacakan debitur mengalami kesulitan bagi petugas yang meneruskan.
- Sebagian pinjaman tidak dilengkapi jaminan atau borg.
- Sistem dan Prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan bank untuk kredit masalah.

Setelah melihat kondisi yang ada di BPR BKK Dawe, Kudus, dimana pada apa yang menyebabkan kredit menjadi macet dan upaya serta beberapa kendala yang di hadapi. Lepas dari itu bahwa pada BPR BKK Dawe, Kudus pada saat ini telah terjadi kredit macet. Hal ini perlu adanya upaya penanganan atas apa yang terjadi, penanganan yang dilakukan pada analisis kualitatif ini meliputi upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

5.4.1. Upaya Penyelamatan

Dalam upaya penyelamatan kredit hanya dianjurkan bilamana BPR BKK Dawe, Kudus mempunyai keyakinan bahwa operasi bisnis dan kondisi keuangan debitur masih dapat diperbaiki. untuk itu perlu diadakannya suatu analisis khusus yang berguna menilai prospek masa depan perusahaan debitur, atau apabila dirasa perlu perusahaan dan debitur mengundang perusahaan konsultan yang berpengalaman di bidang manajemen dan kredit bermasalah untuk membantu debitur menemukan masalah sebenarnya yang sedang mereka hadapi serta solusi dari permasalahan yang di hadapi. Akan tetapi yang perlu dipastikan oleh BPR

BKK Dawe, Kudus selama proses upaya penyelamatan kredit macet tersebut adalah dapat memperkuat posisi tawar menawar (*bargaining position*) perusahaan dengan debitur.

Dalam upaya penyelamatan kredit macet BPR BKK Dawe, Kudus dapat melakukan beberapa strategi yang sering kali digunakan dalam proses ini. Strategi ini meliputi ;

a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Pemberian kelonggaran kepada debitur dalam hal menunda tanggal jatuh tempo pembayaran atau apabila perlunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur, dilakukan dengan penyusunan jadwal baru angsuran kredit yang dapat meringankan debitur untuk melakukan kewajibannya. Penjadwalan kembali ini hanya dilakukan untuk kredit diragukan dan macet.

Dalam penjadwalan kembali perlunasan kredit waktu perpanjangan tanggal jatuh tempo tidak boleh terlalu lama. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya tingkat keseriusan penanganan kredit bermasalah. Debitur merasa bahwa perusahaan tidak mendesak mereka untuk segera melunasi hutangnya. Ini berimplikasi pada keseriusan mereka dalam upaya mencari sumber dana yang dapat melancarkan kewajibannya, dan lebih berbahaya lagi apabila debitur mempergunakan kelebihan uang yang mereka peroleh selama masa penjadwalan kembali untuk mendanai keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan perlunasan kredit.

b. Penataan Kembali Persyaratan Kredit (*reconditioning*)

Penataan kembali persyaratan kredit adalah salah satu upaya memperkuat posisi tawar-menawar BPR BKK Dawe, Kudus dengan debitur. Penataan kembali persyaratan kredit meliputi isi perjanjian kredit, bilamana perlu peninjauan kembali dapat dilakukan, yaitu dengan ditambah ataupun dikurangi.

Upaya penyelamatan kredit macet ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan kredit, dan hanya dilakukan untuk kredit diragukan dan macet. Pada proses seperti ini agar tidak terjadi cacat hukum pada perjanjian yang diperbaharui ini maka diperlukan bantuan penasihat hukum atau pengacara perusahaan.

Pada perjanjian ini dikenal adanya ketentuan khusus (*covenants*) yang mewajibkan debitur melakukan sesuatu (*affirmative covenants*) atau tidak melakukan sesuatu (*negative covenants*), hal ini didasari pada kepentingan dan keamanan kredit yang telah BPR BKK Dawe, Kudus berikan.

Apabila kredit yang diberikan oleh BPR BKK Dawe, Kudus tanpa jaminan, maka dengan terjadinya kredit macet BPR BKK Dawe, Kudus berhak meminta debitur menyediakan jaminan yang jenis dan nilai jualnya dapat diterima oleh BPR BKK Dawe, Kudus. Hal ini pun berlaku apabila ternyata BPR BKK Dawe Kudus merasa jenis dan nilai jaminan yang disediakan kurang memadai, debitur wajib untuk menambah jaminan yang jenis dan nilai dapat diterima oleh pihak bank.

c. Reorganisasi Dan Rekapitalisasi (*reorganization and recapitalization*)

Memperbaiki struktur pendanaan dan struktur organisasi bisnis debitur, terkadang dapat membantu debitur memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan mereka, dimana diharapkan secara simultan debitur dapat melunasi hutangnya. Penyelamatan melalui jalan ini akan memakan waktu yang relatif lama, hal ini karena memperbaiki struktur keuangan debitur tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Hal inipun terlaksana bila ada kedekatan antara BPR BKK Dawe, Kudus dengan debitur.

BPR BKK Dawe, Kudus sebelum mengajukan adanya upaya rekapitalisasi dan reorganisasi, perusahaan harus terlebih dahulu mempelajari secara mendalam kegiatan usaha serta masalah yang sedang debitur hadapi, ini berkenaan dengan seberapa besar resiko yang harus ditanggung dan apakah resiko itu bisa di minimalisasi.

Upaya rekapitulasi merupakan upaya penyehatan struktur pendanaan perusahaan (*corporate financial restructuring*) bertujuan meringankan beban biaya keuangan dan cicilan hutang debitur. Dimana debitur dapat menekan salah satu beban biaya tetap, seperti bunga pinjaman, sehingga diharapkan debitur akan mempunyai daya saing yang lebih kuat (karena dapat menekan biaya pokok per satuan dan harga jual produk).

Upaya reorganisasi dapat dilakukan baik pada segi operasi bisnis perusahaan, dengan jalan penataan kembali atau pengurangan ruang lingkup usaha. Upaya yang lain juga bisa dilakukan reorganisasi susunan badan pengelola perusahaan.

Tujuan yang hendak dicapai adanya reorganisasi ini adalah menurunkan beban biaya tetap dan meningkatkan efisiensi kegiatan operasi perusahaan.

d. Bekerja-sama dengan aparat pemerintah setempat

BPR BKK Dawe, Kudus dapat bekerja sama dengan kepala desa atau kepala kecamatan dimana debitur berdomisili. Dengan pendekatan seperti ini dimana biasanya para kepala pemerintahan ditingkat desa maupun kecamatan dapat memberikan semangat beritikad baik para debitur. Ini penting, karena semuanya bermuara adanya kesungguhan upaya dalam penyelamatan kredit macet tersebut.

Hal lain, dari kerja sama ini adalah sebagai sumber informasi bagi BPR BKK Dawe, Kudus tentang kondisi debitur. Ini menyangkut strategi penyelamatan yang akan dipergunakan, dimana kesesuaian kondisi akan sangat mempengaruhi suksesnya strategi penyelamatan yang dipergunakan.

5.4.2. Upaya Penyelesaian

Upaya penyelamatan yang dilakukan BPR BKK Dawe, Kudus dirasa tidak memberikan hasil yang diharapkan, sehingga mutu kredit macet akan semakin merosot, maka harapan debitur dalam melunasi kewajibanya akan semakin sulit. Dalam kondisi yang demikian ini BPR BKK Dawe, Kudus mempunyai dua macam pilihan dalam menyelesaikan kasus kredit macet tersebut, yaitu 1) Menghapus kredit tersebut dari neraca mereka (*write off the debt*), upaya ini diperlakukan dengan melihat pertimbangan pada kondisi perusahaan yang menjadi debitur dalam keadaan bangkrut, baik itu secara hukum dinyatakan bangkrut atau adanya pernyataan diri kebangkrutan.

Akan tetapi pertimbangan kebangkrutan ini sendiri harus melihat beberapa aspek penyebab kebangkrutan, seperti, pemiliknya tertimpa musibah. 2) Berupaya menagih atau menarik kembali kredit dari debitur. Upaya-upaya itu meliputi :

a. Menagih Langsung Kepada Debitur

Upaya ini dapat dilakukan dengan pertimbangan BPR BKK Dawe, Kudus mempunyai keyakinan bahwa perusahaan debitur masih dapat berjalan meskipun tersendat-sendat, atau dari segi hukum barang jaminan yang dikuasai BPR BKK Dawe, Kudus telah diikat secara sempurna, mudah dicairkan serta cukup besar nilainya. Dalam hal pengiriman surat tagihan ini perlu kiranya meminta pertimbangan dari pengacara perusahaan, hal ini sebagai upaya pencegahan surat resmi yang dikirim tidak mengandung cacat hukum.

b. Menguasai Barang Agunan

Dalam upaya menguasai barang agunan di dalamnya juga memberikan hak untuk mengambil dan menjual barang agunan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 1178 KUH Perdata, guna mengambil perlunasan kredit pokok dan / atau bunga yang tertunggak, kreditur pemegang hipotek pertama jaminan (dan sesuai dengan persetujuan antara kreditur dengan debitur pada saat hipotek diberikan) dapat memiliki hak parate eksekusi, yaitu menjual sendiri harta jaminan itu tanpa persetujuan Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Akan tetapi perlu diingat bahwa pada dasarnya undang-undang menghendaki barang-barang jaminan dijual secara lelang dimuka umum (pasal 1155 dan pasal 1178 KUH Perdata). Cara demikian dimaksudkan agar debitur tidak merasa dirugikan dibandingkan dengan kreditur yang menjual sendiri barang-barang jaminan, sebab dapat terjadi kreditur menjual

barang-barang jaminan dengan asal laku atau ada kepentingan pribadi dengan orang lain yang membeli barang.

Pada prinsipnya penjualan barang-barang jaminan dijual secara lelang, akan tetapi khusus mengenai hipotek dan fiducia untuk tanah beserta rumah susun, pasal 17 Undang-undang No. 16 Tahun 1985 menyebutkan penjualannya dapat dilaksanakan dibawah tangan dengan syarat cara tersebut akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kreditur dan debitur.

c. Menggunakan Jasa Penagih Swasta yang Independent

BPR BKK Dawe, Kudus dapat meminta bantuan biro jasa penagihan (*debt collector*) dalam upaya menagih kredit macet dari debitur. Biro jasa penagihan ini akan menerima balas jasa dari BPR BKK Dawe, Kudus sebesar presentase tertentu dari jumlah tunggakan kredit dan bunga yang tertagih, tentunya hal ini kesepekatan antara BPR BKK Dawe, Kudus dengan biro jasa penagih tersebut.

d. Penyelesaian Menurut Hukum

Upaya yang dilakukan oleh BPR BKK Dawe, Kudus melalui proses diluar pengadilan dirasa tidak membawa hasil, maka dapat ditempuh dengan menagih pembayaran kembali kredit melalui proses Pengadilan Negeri. Cara yang dapat ditempuh oleh BPR BKK Dawe, Kudus dalam upaya ini meliputi :

- Gugatan melalui Pengadilan Negeri, BPR BKK Dawe, Kudus meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri (di daerah domisili yang dipilih guna menyelesaikan perselisihan seperti tercantum dalam perjanjian kredit) untuk mengirimkan somasi kepada debitur, yang isinya kreditu berkehendak agar pihak debitur seketika atau dalam jangka waktu yang pendek untuk membayar kredit (dan bunga) yang debitur tunggak.

- Sita eksekusi harta jaminan, BPR BKK Dawe, Kudus meminta bantuan Pengadilan Negeri untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta jaminan debitur yang telah diikat secara sempurna.

BAB VI

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Jumlah kredit macet yang terjadi pada BPR BKK Dawe, Kudus relatif besar dengan kecenderungan peningkatan atau terlihat pada tabel 1.1. bahkan pada posisi bulan Juni dan Juli 2000 kredit macetnya melebihi 34% dari total kredit yang disalurkan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah perbaikan terutama terhadap variabel-variabel yang berdasarkan analisis data merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kredit macet.

6.1 Tingkat Bunga Kredit

Tingkat bunga ($Ln X_2$) mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap kredit macet, artinya, tingkat bunga sebaiknya diturunkan untuk mengurangi jumlah kredit macet namun tetap mempertimbangkan tingkat bunga sumber dana (tabungan) sehingga pendapatan bank tidak turun dan target laba dapat tercapai karena tidaklah mungkin menurunkan bunga kredit tanpa menurunkan bunga tabungan. Kebijakan penurunan bunga (kredit maupun tabungan) harus didasarkan pada penelitian tentang kondisi tingkat bunga bank pesaing. Sehingga penurunan bunga (kredit atau tabungan) di harapkan pada tingkat bunga yang masih dapat bersaing dengan bank pesaing.

Berdasarkan peraturan yang ada di BPR BKK Dawe, Kudus suku bunga kredit berkisar antara 24% sampai dengan 48%/tahun. Dari hasil pengamatan dan data yang ada, pinjaman yang macet adalah pinjaman dengan suku bunga relatif tinggi yaitu 36%/tahun. Untuk itu dirasa perlu adanya kebijakan penurunan suku bunga kredit.

6.2. Jangka Waktu Kredit

Berdasarkan perhitungan jangka waktu kredit mempunyai pengaruh kuat pada urutan kedua. Jangka waktu yang diberikan relatif pendek (rata-rata 17 bulan) sehingga masih dimungkinkan diadakanya perpanjangan jangka waktu tentunya akan memperingan beban angsuran baik pokok maupun bunga.

Di BPR BKK Dawe, Kudus ada dua jenis kredit yaitu kredit konsumsi untuk pegawai negeri dan kredit modal kerja untuk pengusaha kecil/pedagang. Untuk pegawai negeri jangka waktu kredit disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran berdasarkan gaji. Di BPR BKK Dawe, Kudus kredit konsumsi yang macet pada umumnya adalah dengan jangka waktu kredit 42 bulan. Jangka waktu kredit 42 bulan tersebut sudah merupakan jangka waktu kredit yang paling lama di BPR BKK Dawe, Kudus. Hal tersebut terjadi karena debitur mempunyai pinjaman di bank lain sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya di BPR BKK Dawe, Kudus. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan tukar menukar informasi perkreditan diantara BPR-BPR yang ada di kudus. Namun dalam hal perpanjangan jangka waktu kredit untuk debitur pegawai negeri tidak perlu pertimbangan yang lebih karena pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji.

Kredit modal kerja bagi debitur pengusaha kecil diberikan dengan jangka waktu pendek, maksimum 12 bulan. Dari hasil pengamatan kredit modal kerja yang macet pada umumnya dengan jangka waktu 12 bulan. Perpanjangan jangka waktu kredit yang telah macet bagi kelompok pengusaha kecil sebaiknya diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prospek usaha serta analisis yang lebih tajam terhadap data yang dimiliki pengusaha kecil tersebut.

6.3. Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit diperoleh dengan cara membagi angsuran pokok/pendapatan bunga dengan kredit yang disalurkan merupakan angka yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit. Makin besar kolektibilitas kredit menunjukkan bahwa bank mampu dalam mengelola kreditnya.

Kolektibilitas kredit dapat ditingkatkan dengan cara pemberian kredit secara selektif dan peningkatan kemampuan SDM dalam menganalisis kredit yang akan dicairkan serta pengawasan terhadap kredit-kredit yang telah diberikan.

Disamping itu perlu adanya pemberian motivasi kepada karyawan yang berhasil menagih kredit macet dengan cara pemberian insentif berdasarkan persentase tertentu dari jumlah yang berhasil ditagih. Untuk kredit kepada pegawai negeri yang pembayaran angsurannya dilakukan melalui juru bayar, perlu diberikan insentif yang lebih menarik kepada juru bayar agar pemotongan gaji debitur yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan lancar. Semua kegiatan ini perlu dilakukan dalam usaha memperkecil jumlah kredit macet.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melihat analisis yang telah dilakukan di Bab V dengan alat analisis regresi linier berganda, analisis ratio maupun analisis kualitatif, adalah sebagai berikut :

a. Penyebab timbulnya kredit macet :

- Lemahnya pengawasan/pembinaan bank terhadap debitur.
- Kurang akuratnya analisa, karena terbatasnya SDM yang terampil dalam penguasaan analisis kredit
- Bank belum punya pedoman tertulis yang baku mengenai perkreditan
- Agunan yang kurang memadai dan kredit yang tanpa agunan.
- Terdapat kredit yang diberikan atas rekomendasi Kepala Desa.
- Kegagalan usaha.
- Penyalahgunaan kredit dan itikad tidak baik dari debitur.

b. Setelah di evaluasi dengan pendekatan ekonomi, ekonometri ,maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\ln Y = 2,524 - 0.717 \ln X_1 + 0.959 \ln X_2 - 0,286 \ln X_3$$

Model ini dapat digunakan sebagai prediksi yang memadai karena semua variabelnya signifikan secara statistik dan memiliki daya ramal yang kuat ($R^2 = 0,865$)

UPT-PUSTAK-UNDIP

- c. Independent Variabel yang berupa; jangka waktu kredit ($\ln X_1$), tingkat bunga kredit ($\ln X_2$) dan kolektibilitas kredit ($\ln X_3$) secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah kredit macet dengan alpha ($\alpha=5\%$).
- d. Karena belum sejenisnya independent variabel (Rp, bulan dan %), maka untuk tidak menyesatkan harus dimurnikan dulu dengan menghitung “beta koefisien”. Atas dasar perhitungan beta koefisien, maka urutan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah : tingkat bunga ($\ln X_2$), jangka waktu kredit ($\ln X_1$), dan kolektibilitas ($\ln X_3$).

7.2 Saran

Setelah dilakukannya analisis dari berbagai pendekatan (Kuantitatif dan kualitatif) serta berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk menjaga eksistensi BPR BKK Dawe Kudus, dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Mengupayakan penyelamatan dan penyelesaian kredit macet (membuat *action plan*)
2. Menghapus buku kredit-kredit yang tidak memiliki prospek.
3. Membuat pedoman tertulis mengenai perkreditan dan mengintensifkan penagihan
4. Mengefektifkan fungsi badan pengawas
5. Menurunkan tingkat suku bunga kredit macet pada posisi di atas tingkat bunga tabungan, sehingga langkah menurunkan tingkat suku bunga kredit tanpa meninggalkan tujuan dalam perolehan laba

6. Memberikan keaneka ragaman kredit dilihat dari jangka waktu, yaitu penambahan jasa pinjaman yang dengan jangka waktu yang lebih panjang.
7. Tukar menukar informasi perkreditan di antara BPR-BPR yang ada di Kudus.
8. Memperpanjang jangka waktu kredit untuk kredit modal kerja.
9. Kepada petugas bagian kredit yang ditugasi menagih kredit macet diberikan insentif berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah yang berhasil ditagih.
10. Memberikan insentif yang lebih menarik kepada juru bayar yang melakukan pemotongan gaji debitur yang berasal dari pegawai negeri.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia, **"Himpunan Ketentuan yang Disempurnakan Khusus Bank Perkreditan Rakyat."** Paket 28 Pebruari 1991.
- Lown, Cara and Stavros Peristiani, 1996; **"The Behavior Of Consumer Loan Rates Durung The 1990 Credit Slowdown"** *Journal of Banking and Finance*. 1996.
- Clarke, Peter S. 1989; **Managing Problem Loan, The Complete Guide For Loan Officer, Include Loan Work Out, Debt Structure, Strategies In Bankruptcy**. Illinois: Dow Jones Irwin.
- Duffee, Gregory R. 1996; **"On Measuring Credit Risk of Derivative Instrument"**. *Journal of Banking and Finance* 20. 1996
- Gatot Supramono, 1996; **Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis**. Penerbit Djambatan. Jakarta 1996.
- Gunawan Sumodiningrat, 1998; **Ekonometrika Pengantar**. Yokyakarta :BPFE 1998
- Gujarati, Damodar, 1993; **Basic Econometrics (Ekonometrika Dasar)**. Terjemahan Sumarno Zain. Erlangga. Jakarta.
- Imam Wahjudi, 1994; **Pokok-pokok Pemikiran Dalam Penanganan Kredit Bermasalah**. Pengembangan Perbankan Mei – Juni 1994.
- Iwardono S. Permono dan B. Sandro Secundatmo, 1993; **Trauma Kredit Macet Hantui Perbankan**. Kelola No.4 / II Juni 1993.
- Mahmoeddin, 1995; **100 Penyebab Kredit Macet**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Noerdin Hasibuan, 1994; **Perkembangan Kredit Macet dan Permasalahannya**. Pengembangan Perbankan Mei – Juni 1994.
- Pandu Suharto, 1985; **Mengenal Bank Perkreditan Rakyat Indonesia**. Bank Indonesia.
- Pandu S; Yusuf M. Colter dan Anwar Hafid, 1987; **Masalah Dan Prospek Bank Pasar**. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Robert Hitchings, 1999; **Ratio Analysis as a Tool in Credit Assessment**. *Commercial Lending Review*, Summer 1999.

Robert D. Mason dan Douglas A. Lind 1999, **Teknik Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Erlangga, Jakarta.

Siswanto Sutojo, 1997; **Menangani Kredit Bermasalah: Konsep Teknik dan Kasus**. Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan PT Pustaka Binaman Pressindo.

Subardjo Joyosumarto, 1994; **Upaya-upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah**. Pengembangan Perbankan Mei – Juni 1994.

Soerono Suryokusumo 1996, **Analisis Kredit Macet Pada BPR (sebuah studi terapan pada PT. BPR Bank Pasar Gunung Kinibalu Semarang)**, tesis Program Magister Manajemen Undip, Semarang

Suryanto L. 1997; **Analisis Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Artha Gunung Purwodadi**. Tesis, Program Magister Manajemen Undip. Semarang.

Sugiyono, 1999; **Statistika Untuk Penelitian**. Penerbit CV. Alfabeta, Cetakan ke-2, Bandung.

Thomas Suyatno, 1997; **Kelembagaan Perbankan**. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 1997.

Teguh Pujo Mulyono, 1994; **Manajemen Perkreditan**, Yogyakarta :BPFE 1994

William, C.E. Mory, 1996; **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit Erlangga Jakarta.